

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Albi Anggito dan Johan Setiawan, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, CV.Jejak, Sukabumi.
- Arba, 2021, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Sinar Grafika (Bumi Aksara), Jakarta.
- Benhard Limbong, 2012, *Konflik Pertanahan*, Margaretha Pustaka, Jakarta.
- Gunagera, 2013, "*Rakyat & Negara Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*", PT. Tatanusa, Jakarta.
- Jhonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Depok.
- M. Yahya Harahap, 2019, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maria S.W. Sumardjono, 2011, *Tanah Dalam Prespektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya*, PT Kompas, Jakarta.
- Mukti Arto, 2011, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Munir Fuady, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Cetakan Pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sarwono, 2012, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soeparmono, 2013, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta.
- Soesilo dan Pramudji R, 2010, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan Pertama, Rhedbook Publisher, Surabaya.
- Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, 2011, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta.
- Tri Andrisman, 2010, *Hukum Acara Pidana*, Lampung, Universitas Lampung.
- Zainuddin Ali, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. JURNAL

- Fengky Kotalewala, dkk.,2020, *Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Untuk Kepentingan Umum*, SASI Universitas Pattimura, Ambon, p-ISSN:1693-0061/e-ISSN:2614-2961 Vol.26 No.3, diakses dari <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/397> pada 8 Desember 2021.
- FX. Sumarja, *Eksistensi Lembaga Penilai Dalam Pengadaan Tanah*, BHUMI:Jurnal Agraria dan Pertanahan STPN, Yogyakarta, p-ISSN 2442-6954/e-ISSN 2580-2151, vol.5 No. 2,hlm. 11. diakses dari <https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/371> pada 10 Desember 2021.
- Nabila Kamal, 2021, *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Terhadap Penyimpangan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dengan Instrumen Pinjam Pakai Tanah*, Otentik's Jurnal Hukum Kenotariatan Universitas Pancasila, Jakarta, p-ISSN:2665-5131/e-ISSN:2685-3612, Vol.3 No.1, di akses dari <http://journal.univpancasila.ac.id/index.php/otentik/article/view/2127> pada 8 Desember 2021.
- Putri Lestari, 2020, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Demi Kepentingan Umum Di Indonesia Berdasarkan Pancasila*, SIGN Jurnal Hukum, e-ISSN:2685-8606/p-ISSN:2685-8614 Vol. 1, No.2, di akses dari <https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v1n2-71-86> pada 28 November 2021.
- Rahayu Subekti, 2016, *Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Yustisia Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Solo, Vol.5 No.2, diakses dari <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8754> pada 27 November 2021.
- Tengku Erwinsyahbana Ramlan, 2017, *Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Hukum Dalam Perspektif Filsafat Konstruktivis*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Sumatera Utara, diakses dari <http://jurnal.borneo.ac.id/index.php/bolrev/article/view/706> pada 7 Desember 2021.

C. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria

Undang-Undang No.20 tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden No 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum

Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.01/2014 Tentang Penilai Publik

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penilai Pertanahan

SEMA No 04 Tahun 1974 SEMA No 04 Tahun 1974 tentang Pemeriksaan Pengadilan dan Pengucapan Putusan Harus Dilakukan Dalam Sidang Yang Terbuka Untuk Umum

D. INTERNET

- Course Hero, *SPI 366 Juknis*, <https://www.coursehero.com/file/65594042/Juknis-SPI-306-01-12-2014pdf/>, diakses pada tanggal 20 Desember 2020.
- Dirjen Kemenkeu, *Putusan Hakim dalam Acara Perdata*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2299/Putusan-Hakim-Dalam-Acara-Perdata.html> diakses 2 April 2021.
- Kamus Lengkap, *Appraisal*, <https://kamuslengkap.id/kamus/inggris-indonesia/arti-kata/appraisal/>, diakses pada tanggal 13 Januari 2021.
- Rinto Heksantoro, *Bendungan Tertinggi di Indonesia akan Dibangun di Purworejo*, <https://finance.detik.com/infrastruktur/d-4291694/bendungan-tertinggi-di-indonesia-akan-dibangun-di-purworejo> diakses pada tanggal 24 Juli 2020.
- Rinto Heksantoro, *PN Purworejo Kabulkan Gugatan Ganti Rugi Warga Terdampak Bendung Bener*, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4890312/pn-purworejo-kabulkan-gugatan-ganti-rugi-warga-terdampak-bendung-bener> diakses pada tanggal 24 Juli 2020.
- Yandip Prov Jateng, *Pembangunan Bendungan Bener Terus Berlanjut*, <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/pembangunan-bendung-bener-terus-berlanjut/> diakses pada tanggal 24 Juli 2020.
- Kamus Lengkap, *Arti dari Independent Appraiser*, diakses dari <https://kamuslengkap.com/kamus/ekonomi/arti-kata/penilai-independen> pada 24 November 2021.